



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah telah berkiprah melewati berbagai fase zaman yang sarat dinamika. Di era Kolonial, Muhammadiyah berperan dalam pergerakan kebangkitan kebangsaan menuju kemerdekaan Indonesia. Menjelang dan pada awal kemerdekaan, Muhammadiyah berperan aktif dalam meletakkan fondasi negara bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pada masa Orde Lama Muhammadiyah istiqamah dalam menegakkan Negara Republik Indonesia agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan cita-cita kemerdekaan, disertai usaha-usaha modernisasi sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di era Orde Baru, Muhammadiyah terus berkiprah dengan kerja-kerja kemasyarakatan untuk memajukan kehidupan bangsa, disertai sikap hikmah dalam menghadapi situasi politik nasional. Pada era Reformasi, Muhammadiyah menjadi pilar penting kekuatan masyarakat madani (*civil society*) dan memelopori lahirnya era baru Indonesia yang demokratis, menghargai hak asasi manusia, dan berwawasan kemajuan (Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua, 2000).

Saat lahirnya partai politik Islam, Masyumi, 1945 di Madrasah Muallimin Muhammadiyah jalan Letjen S Parman 68 Yogyakarta, Muhammadiyah memberi peran dan andil yang sangat besar. Peran dan andil besar dan strategis pertama adalah adanya 11 (sebelas) orang Muhammadiyah yang berada dalam kepengurusan Masyumi yang jumlahnya 24 (dua puluh empat) orang. Peran dan andil besar kedua

yang sangat penting serta monumental adalah bahwa pertemuan dan musyawarah hingga terbentuknya Partai Masyumi diselenggarakan di gedung Madrasah Muallimin Muhammadiyah (Syaifullah, 1997). Sistem keanggotaan partai Masyumi menggunakan dua model. Pertama, keanggotaan secara perorangan. Kedua, keanggotaan secara organisasi atau kelembagaan. Secara perorangan, orang-orang Muhammadiyah yang menjadi pengurus Masyumi jumlahnya sangat signifikan. Secara organisasi atau kelembagaan, Muhammadiyah telah diputuskan dan dinyatakan menjadi anggota istimewa Masyumi bersama ormas Islam yang lain. Keanggotaan Istimewa ini memberi hak kepada Muhammadiyah untuk bersikap kritis dan berwenang memberi nasehat atau saran kepada Masyumi (Syaifullah, 1997)

Kondisi ideal perilaku Pimpinan Muhammadiyah yang selalu didasarkan pada kebijakan organisasi diharapkan terwujud pada setiap diri Pimpinan ditingkatan manapun, baik itu Pimpinan ditingkat Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, maupun Ranting. Dalam kebijakan organisasi yang diwujudkan dalam berbagai Surat Keputusan, Pimpinan Persyarikatan menegaskan bahwa Muhammadiyah melarang Pimpinan Persyarikatan di semua jenjang/tingkatan berpolitik praktis dengan mendukung kepala negara, dan kepala daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua. Muhammadiyah itu mengapresiasi politik tetapi punya tempatnya lewat partai politik. Urusan politik kekuasaan, pilkada pilpres nanti domain pelakunya itu tokoh-tokoh politik dan partai politik. Tentu Muhammadiyah harus menjadi partisipan atau subjek yang aktif dan cerdas, maka Muhammadiyah jangan dibawa ke arena itu, agar tidak mencampur adukkan hanya dengan klaim ini paling Islami, ini membela Islam dan yang lain tidak. Jadi tetap bahwa Muhammadiyah punya jalur sebagai gerakan dakwah alamru bil ma'ruf wanahyu nganil munkar (Nasir & Jinan, 2018).

Muhammadiyah mengapresiasi dukungan masyarakat, penyelenggara Pilkada, pasangan calon dan tim kampanye, media massa, dan aparat keamanan atas terselenggarakannya kampanye damai, aman, santun, beradab, dan berkualitas. Muhammadiyah mengimbau warga menggunakan hak politiknya dengan pertimbangan dan sikap kritis, obyektif, dan rasional. penyelenggara pilkada agar menjamin proses dan kontestasi demokrasi tersebut benar-benar berkualitas dengan menjunjung tinggi objektivitas, profesionalitas, memegang teguh amanah, menegakan aturan dengan konsisten, jujur, adil, transparan, akuntabel, serta tidak memihak kepada salah satu kandidat. Menyerukan kepada semua pasangan calon kepala daerah dan para pendukungnya untuk bersikap jujur, bijaksana, ksatria, dan berjiwa besar menerima apapun hasil Pilkada, serta siap menang dan siap kalah. Meminta apatur keamanan untuk melindungi, menjamin keamanan, dan menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat, khususnya warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya. Aparatur keamanan hendaknya mengerahkan segenap kemampuan untuk menjaga netralitas negara dalam penyelenggaraan Pilkada. Mengimbau kepada warga persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih kandidat yang berakhlak mulia, amanah, jujur, bersih, kompeten, dekat dengan rakyat, dan peduli terhadap dakwah serta perjuangan umat Islam. Muhammadiyah mengimbau seluruh warga masyarakat hendaknya menjaga kebersamaan dan kerukunan, bahwa perbedaan pilihan politik tidak menjadi faktor keretakan dan disintegrasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya yang memiliki hak pilih, hendaknya menggunakan hak politiknya secara cerdas dan bermartabat, menjunjung tinggi kejujuran dan kebersamaan, serta terus mengawasi para wakilnya yang telah dipilih agar benar-benar menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Kepada warga Muhammadiyah agar menggunakan hak pilihnya secara cerdas dengan pikiran dan kalbu yang jernih, *istiqamah* dalam menegakkan Khittah dan kebijakan Persyarikatan, memelihara ukhuwah dan menghindarkan diri dari perpecahan, tidak menggunakan amal usaha untuk kampanye, serta senantiasa menjunjung tinggi kepentingan dan martabat

organisasi (PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 13 Februari 2017).

Akan tetapi Pimpinan Muhammadiyah Sleman melakukan politik praktis dalam pilkada 2010 dan 2015. Alasan rasionalitas politiknya adalah bahwa dalam filsafat, rasionalitas merupakan pelaksanaan alasan. Yang dimaksud dengan rasional adalah karena hubungan sebab akibat dapat dipahami secara jelas dan langsung. Sementara yang logis karena sesuai dengan kenyataan umum (Warsito, T., 2017), tampaknya menjadi kerangka berpikir dan melatarbelakangi Pimpinan Muhammadiyah Sleman ketika mereka merasa telah berpikir logis dan bertindak secara rasional dalam konteks pilkada. Adalah hal yang tidak selayaknya, jika ada kader Muhammadiyah berkesempatan maju menjadi calon kepala daerah namun disikapi dingin atau malah ditolak.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh organisasi, agama, informasi politik, dan modal social terhadap perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam Pilkada 2010 dan 2015, maka dilakukan penelitian yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif dengan cara responden menjawab sejumlah pertanyaan yang diperinci dalam aspek organisasi, agama, informasi politik, modal sosial, dan perilaku memilih. Terkait dengan beberapa model pendekatan dalam penelitian, model mobilisasi tampaknya sangat cocok digunakan karena model ini menggunakan 4 variabel persis dengan aspek yang diduga berkait erat dengan perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman tersebut. Sebab itu kerangka pemikiran yang digunakan adalah bahwa perilaku memilih dipengaruhi oleh variabel organisasi, agama, modal sosial, informasi politik. Sehingga organisasi (X1), agama (X2), informasi politik (X3), modal sosial (X4), dan perilaku memilih (Y). Akan tetapi setelah dilakukan oleh data hasil penelitian, ternyata variabel modal sosial bukan sebagai variabel independen tetapi sebagai variabel antara (Z) yang menjadi

penghubung ketiga variabel terhadap perilaku memilih. Pada saat yang sama, ketiga variabel (organisasi, agama, informasi politik) juga menjadi variabel yang mempengaruhi langsung perilaku memilih. Dengan demikian, posisi ini mengubah kerangka pemikiran yang semula hanya berisi variabel X dan Y berubah menjadi variabel independen ( X), variabel antara (Z), dan variabel dependen ( Y).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Perbincangan akhir pada latar belakang masalah di atas memunculkan semangat dan antusiasme untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang Perilaku Memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman. Akan tetapi supaya kajian dan penelitian dapat lebih terarah dan fokus, maka dituntun dengan rumusan masalah sebagai panduannya seperti di bawah ini.

1. Adakah pengaruh organisasi terhadap perilaku memilih?
2. Adakah pengaruh agama terhadap perilaku memilih?
3. Adakah pengaruh informasi politik terhadap perilaku memilih?
4. Adakah pengaruh modal sosial terhadap perilaku memilih?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menjelaskan alasan-alasan yang mempengaruhi perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman pada pemilihan Bupati daerah Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2015.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran yang lebih kritis dan berkualitas terhadap beberapa asumsi yang dikembangkan selama ini oleh kajian dan penelitian sebelumnya sehingga diharapkan bisa

menambah literatur mengenai perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah.

2. Selain bermanfaat secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberi manfaat secara praktis dalam pemahaman yang lebih tepat tentang gejala atau fenomena perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai bahan renungan dan pertimbangan bagi Pimpinan Muhammadiyah dalam mewujudkan maksud dan tujuannya.